

---

## **PEDOMAN PENINGKATAN KINERJA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) SERTA PEMBERDAYAAN PPNS TAHUN 2014**



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2014

## KATA PENGANTAR

Pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terkordinasi antara pusat dan daerah, antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dengan keterlibatan instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida dalam komisi pengawasan tersebut diharapkan permasalahan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang terjadi di daerah dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Disamping melalui peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan sangat mendukung dalam mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No12 tahun 1992 tentang Sistem Budiadaya Tanaman.

Melalui Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diharapkan kinerja KPPP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut dapat lebih optimal sehingga pupuk dan pestisida yang beredar lebih terjangkau, ketersediaan dan kualitasnya sehingga tidak merugikan pengguna dan kelestarian lingkungan serta mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional.

Buku “ **Pedoman Peningkatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) serta Pemberdayaan PPNSTahun Anggaran 2014** “dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah. Diharapkan melalui pedoman ini Pimpinan Daerah dapat memberikan kontribusi dalam pendampingan dan pembiayaan untuk operasional KPPP, sehingga pengelolaan pengawasan pupuk dan pestisida di masing-masing wilayah dapat dilakukan secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

Jakarta, Desember 2013  
Direktur Jenderal PSP,

Sumarjo Gatot Irianto  
NIP. 19601024 198703 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	3
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN .....	4
A. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida .....	4
B. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .....	8
III. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	12
A. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi .....	13
B. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota .....	20
C. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .....	23
IV. EVALUASI DAN PELAPORAN .....	26
A. Evaluasi .....	26
B. Pelaporan .....	26

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Alokasi Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kab/Kota .....	29
2. Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik .....	50
3. Lembaga Uji Mutu Pupuk Organik, Pembenhah Tanah dan Hayati .....	53
4. Lembaga Uji Mutu Pestisida .....	56
5. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida (Provinsi ) .....	57
6. Format Laporan Penguatan KP3 dan Pemberdayaan PPNS .....	61
7. Outline Laporan .....	62
8. Hasil Analisa Sampel .....	63

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyediaan pupuk pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk yang menyebabkan harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani. Selain dari pupuk bersubsidi.

Kebijakan lain yang telah ditempuh dibidang pupuk dan pestisida adalah dengan diberlakukannya deregulasi dibidang pendaftaran pupuk dan pestisida. Kebijakan tersebut memberikan dampak dengan semakin banyaknya jenis pupuk dan pestisida yang beredar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Sampai dengan Desember 2013, jumlah pupuk yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian mencapai 1.576 merek pupuk an-organik dan 969 merek pupuk organik, hayati dan pembenah tanah, demikian halnya dengan pestisida sudah mencapai 2.810 formulasi untuk pertanian dan kehutanan dan 394 formulasi untuk pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit manusia. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk memilih jenis pupuk dan pestisida yang sesuai dengan kemampuannya.

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan, namun kenyataannya

dilapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu yang tidak diketahui mutu dan efektifitasnya. Kasus lainnya pada pupuk subsidi yang sangat menonjol yakni ekspor serta penggantian karung pupuk subsidi. Mengingat kondisi tersebut maka pengawasan pupuk dan pestisida harus dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta antara instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) merupakan wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur maupun tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Disamping wadah koordinasi tersebut upaya mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida juga sangat diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang no. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam mendukung penyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2013 telah memfasilitasi penyiapan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida sejumlah 90 orang yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai tambahan tenaga penyidik yang sudah ada sebelumnya.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertujuan untuk memberikan arahan operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan

### **2. Sasaran**

- 1) Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait
- 2) Tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah
- 3) Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di seluruh Indonesia.
- 4) Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan pestisida antara PPNS Pupuk dan Pestisida dengan Korwas Polda
- 5) Tersosialisasikannya Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf f,g dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman baik dilingkungan aparat pengawas pupuk dan pestisida maupun pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida



## II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

### A. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah salah satu wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Agar semua instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka komisi pengawasan pupuk dan pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah dan dinas terkait dengan ketua komisi ditetapkan adalah Sekretaris Daerah. Gambaran umum susunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

- Pembina : 1. Gubernur  
2. Wakil Gubernur
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
- Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Provinsi
- Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi
- Sekretaris I : Kepala Bidang yang menangani pupuk dan Pestisida, Dinas Pertanian Provinsi
- Sekretaris II : Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi  
2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi  
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
6. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi).
7. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi)
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi
9. Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan Provinsi
10. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
13. Unsur kejaksaan Tinggi/Negeri Provinsi
14. Unsur Polisi Daerah Provinsi
15. Kepala Kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi
16. Kepala Biro Hukum setda Provinsi
17. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi
18. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi
19. Kepala Balai Riset dan Standarisasi Nasional Provinsi
20. Kepala Laboratorium dan Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Provinsi
21. Kepala Laboratorium Hama.....(khusus Kabupaten/ Kota)

Sedangkan susunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Pembina : 1. Bupati/Walikota  
2. Wakil Bupati/Wakil Walikota
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
- Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Kabupaten/Kota
- Sekretaris I : Kepala Bidang yang menangani pupuk dan Pestisida, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
- Sekretaris II : Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota  
2. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota  
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota  
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota  
7. Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan Kabupaten/Kota.  
8. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Unsur kejaksanaan Tinggi/Negeri Kabupaten/Kota
12. Unsur Polisi Daerah Kabupaten/Kota
13. Kepala Biro Hukum setda Kabupaten/Kota
14. Kepala Laboratorium Hama.....(khusus Kabupaten/ Kota)

Ruang lingkup kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)

#### **1. Provinsi**

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dialokasikan di 30 Provinsi di seluruh Indonesia kecuali Papua Barat, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta, secara umum meliputi :

- 1) Pertemuan Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 2) Rapat Koordinasi KPPP Provinsi
- 3) Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida
- 4) Analisa Sampel Pupuk dan Pestisida
- 5) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Selain kegiatan tersebut diatas, di beberapa Provinsi tersedia kegiatan Pelatihan Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.

## **2. Kabupaten/Kota**

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan di 441 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan kegiatan utama meliputi :

- 1) Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kelompok.
- 2) Rapat Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
- 3) Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
- 4) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 5) Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida

Dana KPPP untuk tiap propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan alokasi pupuk bersubsidi

### **B. PEMBERDAYAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).**

Kegiatan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida diarahkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan POLDA/Korwas Daerah dan dialokasikan di 26 Provinsi, yakni Provinsi NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Bangkabelitung, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Kegiatan yang sama juga dilakokasi di 11 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Mandailing Natal, Kampar, Tuban, Kota Palembang, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Bungo dan Merangin

Secara umum ruang lingkup kegiatan antara lain Pemberdayaan PPNS baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain:

1. Koordinasi Penyelidikan dengan Korwas Propinsi;
2. Pengawasan, pengamatan dan pencarian informasi;
3. Penyusunan laporan pengawasan;
4. Penyusunan Pemberkasan.
5. Pembelian sampel pupuk dan pestisida
6. Analisa sampel pupuk dan pestisida

Secara rinci kegiatan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida tahun 2014 adalah sebagai tabel berikut :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMBERDAYAAN PPNS PUPUK DAN PESTISIDA TA 2014**  
**TINGKAT PROVINSI**

KODE	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
				<b>102.650.000</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>7.050.000</b>
	- ATK	2,00 PKT	1.500.000	3.000.000
	- Fotocopy Bahan-bahan	2,00 PKT	250.000	500.000
	- Penjilidan dan Penggandaan	2,00 PKT	500.000	1.000.000
	- Biaya Komunikasi	1,00 PKT	550.000	550.000
	- Dokumentasi	1,00 PKT	500.000	500.000
	- Pembelian sampel pupuk	10,00 SMPL	50.000	500.000
	- Pembelian sampel pestisida	10,00 SMPL	100.000	1.000.000
<b>521219</b>	<b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</b>			<b>29.400.000</b>
	- Penyusunan Laporan Pengawasan, pengamatan dan Pencarian Keterangan	18,00 OH	350.000	6.300.000
	- Penyusunan Pemberkasan	36,00 OH	350.000	12.600.000
	- Rapat koordinasi dengan Korwas Polda ( 3 x 10 OH)	30,00 OH	350.000	10.500.000
<b>522119</b>	<b>Belanja Jasa Lainnya</b>			<b>11.000.000</b>
	- Analisa Sampel Pupuk	10,00 Sampel	500.000	5.000.000
	- Analisa Sampel Pestisida	10,00 Sampel	600.000	6.000.000
<b>524119</b>	<b>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</b>			<b>55.200.000</b>
	- Pengawasan, Pengamatan dan Pencarian Informasi	18,00 OP	1.200.000	21.600.000
	- Perjalanan Sumber Informasi	12,00 OP	1.200.000	14.400.000
	- Pemanggilan saksi	3,00 OP	1.200.000	3.600.000
	- Konsultasi ke Pusat	3,00 OP	5.200.000	15.600.000

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMBERDAYAAN PPNS PUPUK DAN PESTISIDA TA 2014**  
**TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

KODE	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
				<b>52.900.000</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>4.100.000</b>
	- ATK	1,00 PKT	1.400.000	1.400.000
	- Fotocopy Bahan-bahan	1,00 PKT	250.000	250.000
	- Penjilidan dan Penggandaan	2,00 PKT	500.000	1.000.000
	- Biaya Komunikasi	1,00 PKT	500.000	500.000
	- Dokumentasi	1,00 PKT	500.000	500.000
	- Pembelian sampel pupuk	3,00 SMPL	50.000	150.000
	- Pembelian sampel pestisida	3,00 SMPL	100.000	300.000
<b>521219</b>	<b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</b>			<b>11.900.000</b>
	- Penyusunan Laporan Pengawasan, pengamatan dan Pencarian Keterangan	12,00 OH	350.000	4.200.000
	- Penyusunan Pemberkasan	12,00 OH	350.000	4.200.000
	- Rapat koordinasi dengan Korwas Polda	10,00 OH	350.000	3.500.000
<b>522119</b>	<b>Belanja Jasa Lainnya</b>			<b>3.300.000</b>
	- Analisa Sampel Pupuk	3,00 Sampel	500.000	1.500.000
	- Analisa Sampel Pestisida	3,00 Sampel	600.000	1.800.000
<b>524119</b>	<b>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</b>			<b>33.600.000</b>
	- Pengawasan, Pengamatan dan Pencarian Informasi	12,00 OP	800.000	9.600.000
	- Perjalanan Sumber Informasi	10,00 OP	800.000	8.000.000
	- Pemanggilan saksi	3,00 OP	800.000	2.400.000
	- Konsultasi ke Provinsi	4,00 OP	800.000	3.200.000
	- Konsultasi ke Pusat	2,00 OP	5.200.000	10.400.000



### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tahun 2014 berasal dari dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan mata anggaran kegiatan/akun yang terdiri dari : belanja bahan, belanja jasa lainnya, belanja perjalanan biasa dan belanja perjalanan paket meeting dalam kota. (***bukan dalam bentuk belanja sosial lainnya***).

Kegiatan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida TA 2014 dialokasikan ke Provinsi seluruh Indonesia (30 Provinsi kecuali Kepulauan Riau, Papua Barat dan DKI Jakarta) dan 441 Kabupaten/Kota. Lokasi kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana ***lampiran 1***.

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi berada pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi (Dana Dekonsentrasi) sedangkan kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota berada pada satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau berada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

## **A. PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) PROVINSI**

### **1. Pertemuan Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)**

Pertemuan evaluasi kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilaksanakan dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi komisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) masing-masing daerah/Provinsi. Kegiatan tersebut disamping dihadiri oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi juga dihadiri oleh wakil Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dari Provinsi masing-masing serta pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida. Narasumber dalam pertemuan adalah Instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida di Provinsi ( Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Polda, Kejaksaan, serta dari Pusat (Mabes Polri dan Direktorat pupuk dan Pestisida).

### **2. Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).**

Rapat koordinasi KPPP dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang

ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPPP) Provinsi. Rapat koordinasi tidak semata-mata hanya membahas pupuk bersubsidi tetapi juga pupuk non subsidi dan pestisida serta permasalahan lain terkait dengan pupuk dan pestisida.

### 3. Pengambilan/Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida

Pengambilan/Pembelian sampel pupuk dan pestisida diarahkan hanya untuk pupuk dan pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian dan diusahakan agar berasal dari kios yang berbeda. Khusus untuk pupuk, mengingat biaya analisa mutu pupuk sangat bervariasi (tergantung jumlah unsur hara yang akan dianalisa), disamping pupuk bersubsidi sebaiknya juga lebih diarahkan untuk pupuk-pupuk non subsidi termasuk pupuk organik.

Semua sampel pupuk dan pestisida yang diambil harus mempunyai **BARCODE** dan **TAHUN PRODUKSI** disertai dengan bukti pembelian di kios, sebagai dasar tindak lanjut dari hasil pengujian mutu di laboratorium. Tanpa adanya Barcode dan Tahun Produksi teguran terhadap penyimpangan mutu pupuk dan pestisida sulit ditindaklanjuti oleh Pemegang Nomor Pendaftaran.

### 4. Analisa Sampel Pupuk

Analisa sampel pupuk bertujuan untuk mengetahui konsistensi mutu pupuk pada saat didaftarkan dengan pada saat diedarkan. Analisa

sampel pupuk dilakukan terhadap pupuk yang diambil/dibeli di kios pupuk dan pestisida yang telah dijamin legalitasnya. Jumlah sampel yang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) **atau dapat disesuaikan dengan memperhitungkan biaya analisa yang dibutuhkan dengan biaya yang tersedia.** Analisa dilakukan untuk semua unsur hara yang terkandung pada label pupuk dan dilakukan oleh Lembaga Pengujian Yang Terakreditasi atau lembaga uji mutu pupuk yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian : Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Permentan Nomor :70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (**Lampiran 2 dan 3**).

## **5. Analisa Sampel Pestisida**

Sebagaimana halnya pupuk, analisa sampel pestisida bertujuan untuk mengetahui konsistensi mutu pada saat didaftarkan dengan pada saat diedarkan. Analisa sampel pestisida yang dianalisa adalah hasil pengambilan/pembelian sampel pestisida yang telah dijamin legalitasnya. Jumlah sampel pestisida yang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasional (POK). Analisa dilakukan dilembaga uji mutu pestisida yang terkreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida sebagaimana **lampiran 4**.

## 6. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan untuk meningkatkan peran dan kemampuan petugas pengawas Kabupaten/Kota serta pembinaan terhadap distributor, kios pupuk dan pestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan pestisida. Hasil pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida seharusnya ditindaklanjuti, terutama terhadap kasus peredaran yang mengarah kepada tindak pidana. Penyelesaian tindak kasus pidana pupuk dan pestisida dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di daerah atau dengan pihak Polda yang merupakan bagian dari anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi.

Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terpadu oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan dilaksanakan secara periodik. Khusus untuk pupuk bersubsidi pembinaan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk dari Distributor ke Kios Pengecer dan dari Kios Pengecer kepada Kelompok Tani yang sudah tercantum dalam Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara untuk pupuk non subsidi dan pestisida lebih diarahkan kepada legalitas pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan. Mengingat masih banyaknya beredar pestisida dengan bahan aktif Indosulfan seperti Akodan, Akodani dan Indodan, maka fokus utama untuk pengawasan peredaran pestisida sebaiknya diarahkan kepada produk tersebut, karena produk pestisida dimaksud adalah produk ILEGAL yang sudah dilarang beredar

dan digunakan untuk pertanian dan tambak ikan. Modus peredaran pestisida tersebut biasanya dilakukan melalui distributor tidak resmi dan sulit dilacak keberadaannya.

## 7. Pelatihan Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida

Kegiatan Pelatihan Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida dialokasikan di 4 Provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing (1 angkatan).

Peserta pelatihan adalah petugas pengawas pupuk dan pestisida dari Kabupaten/Kota masing-masing Provinsi dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang per angkatan. Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari efektif. Narasumber berasal dari daerah dan pusat ( Balittanah, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Pupuk dan Pestisida dan HMPN/Crop life). ***Peserta setelah mengikuti apresiasi wajib diberikan sertifikat pelatihan untuk selanjutnya dapat diusulkan menjadi tenaga pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota***, serta dapat dimasukkan dalam kelompok jabatan fungsional pengawas pupuk dan pestisida (saat ini Pusat sedang mempersiapkan jenjang karier fungsional pengawas pupuk dan pestisida). Jadwal tentatif pelaksanaan Apresiasi Teknis Pupuk dan Pestisida sebagai berikut :

JADWAL				
PELATIHAN PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2013				
NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
1	HARI I			
	14.00 - 20.00		Pendaftaran Peserta	Panitia
2	HARI II			
	09.00 - 09.45		Pembukaan	Kepala Dinas Pertanian
	09.45 - 10.00		Istirahat	
	10.00 - 11.30	2	Kebijakan di Bidang Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.30 - 13.00	2	Klasifikasi dan Spesifikasi Mutu Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	13.00 - 14.00		ISHOMA	
	14.00 - 15.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	15.30 - 15.45		Istirahat	
	15.45 - 17.15	2	Metode Pendeteksian Pupuk Palsu Secara Cepat	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	HARI III			
	08.00 - 09.30	2	Mekanisme Pendaftaran Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
09.30 - 09.45		Istirahat		
09.45 - 11.15	2	Mekanisme Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida	
11.15 - 12.45	2	Pengenalan dan dan Pemeriksaan Pestisida Secara Sederhana	Crop Life/HMPN	
12.45 - 13.45		ISHOMA		
13.45 - 15.15	2	Pengambilan dan Pengiriman Pestisida dan Residu Pestisida pada Hasil Pertanian dan Lingkungan	BPTPH Provinsi	
15.15 - 15.30		Istirahat		
15.30 - 17.00	2	Keselamatan Kerja dan Kesehatan Tenaga Kerja di Bidang Pestisida	Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja Kemenakertrans	

NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
<b>4</b>	<b>HARI IV</b>			
	08.00 - 09.30	2	Penanganan Pestisida Tidak Layak Pakai	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perdagangan Provinsi
	11.15 - 12.45	2	Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Dinas Pertanian Provinsi
			Melalui Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida	
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan	Korwas Polda
			Pestisida	
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan	Korwas Polda
			Pestisida	
<b>5</b>	<b>HARI V</b>			
	08.00 - 09.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pestisida	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Evaluasi Akhir	Panitia
	11.15 - 12.00		Penutupan	



## **B. PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) KABUPATEN/KOTA**

### **1. Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kelompok Tani.**

Kegiatan Identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :

- a) tingkat pemahaman kelompok tani/petani dalam penerapan pupuk berimbang dan spesifik lokasi;
- b) gambaran kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK yang sudah disusun;
- c) pengetahuan kelompok tentang pestisida yang dilarang serta penggunaan pestisida dalam berusahatani.

Identifikasi lebih diarahkan di daerah dengan tingkat penggunaan pupuk dan pestisida yang relatif lebih banyak, sehingga didapatkan gambaran kecenderungan petani dalam penggunaan pupuk dan pestisida tertentu.

### **2. Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota**

Kegiatan evaluasi kinerja komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dengan tujuan untuk mengetahui kinerja komisi dimaksud. Permasalahan dan upaya tindak lanjut pemecahannya seharusnya dapat disampaikan dalam pertemuan evaluasi tersebut. Pertemuan evaluasi kinerja komisi

pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) dihadiri oleh seluruh anggota komisi dan pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida di masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

### **3. Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).**

Sebagaimana halnya dengan Provinsi, rapat koordinasi KPPP Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida ditingkat Kabupaten/Kota. yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Rapat koordinasi dilaksanakan 4 kali yang dihadiri oleh semua anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota serta petugas pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten/Kota.

### **4. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida**

Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan untuk meningkatkan peran dan kemampuan petugas pengawas Kabupaten/Kota serta pembinaan terhadap distributor, kios pupuk dan pestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan pestisida. Hasil pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida seharusnya ditindaklanjuti, terutama terhadap kasus peredaran yang mengarah kepada tindak pidana. Penyelesaian tindak kasus pidana

pupuk dan pestisida dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di daerah atau dengan pihak Polda yang merupakan bagian dari anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota.

Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terpadu oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan dilaksanakan secara periodik. Khusus untuk pupuk bersubsidi pembinaan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk dari Distributor ke Kios Pengecer dan dari Kios Pengecer kepada Kelompok Tani yang sudah tercantum dalam Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara untuk pupuk non subsidi dan pestisida lebih diarahkan kepada legalitas pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan. Mengingat masih banyaknya beredar pestisida dengan bahan aktif Indosulfan seperti Akodan, Akodani dan Indodan, maka fokus utama untuk pengawasan peredaran pestisida sebaiknya diarahkan kepada produk tersebut, karena produk pestisida dimaksud adalah produk ILEGAL yang sudah dilarang beredar dan digunakan untuk pertanian dan tambak ikan. Modus peredaran pestisida tersebut biasanya dilakukan melalui distributor tidak resmi dan sulit dilacak keberadaannya.

## **5. Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida**

Inventarisasi peredaran pupuk dan pestisida bertujuan untuk mengetahui sebaran peredaran pupuk dan pestisida di suatu Kabupaten/Kota serta untuk mengetahui jenis formulasi pestisida yang

dominan digunakan untuk masing-masing komoditi. Hasil inventarisasi peredaran pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan gambaran jenis pupuk dan pestisida mana yang dominan beredar dan digunakan oleh petani di wilayah tersebut. Format hasil inventarisasi sebagaimana *lampiran 5*.

### **C. PEMBERDAYAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PUPUK DAN PESTISIDA**

Kegiatan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan maupun Dinas Perkebunan Provinsi atau PPNS Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota meliputi :

#### **1. Koordinasi Penyelidikan Dengan Korwas Polda**

Kegiatan koordinasi penyelidikan dilaksanakan dalam rangka menggalang koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polda (korwas) dan kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya terhadap kasus tindak pidana dibidang pupuk dan pestisida yang perlu dilakukan penyelidikan. Melalui koordinasi tersebut diharapkan tercipta sinergi penerapan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida yang mengacu kepada tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang ada, rapat koordinasi penyelidikan dilaksanakan 2 kali dan dihadiri oleh PPNS (baik bidang pupuk dan pestisida maupun bidang benih dan perkebunan), Polda,

Kejaksanaan, Unsur Pemda serta Dinas terkait dibidang pupuk dan pestisida

**2. Pembelian sampel pupuk, pestisida dan analisa sampel pupuk dan pestisida**

Kegiatan ini berpedoman pada kegiatan yang sama pada penguatan kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

**3. Pengawasan, pengamatan dan pencarian informasi**

Kegiatan pengawasan, pengamatan dan pencarian informasi kasus pidana pupuk dan pestisida dilaksanakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian tindak kasus pidana pupuk dan pestisida yang sedang terjadi di daerah.

**4. Konsultasi ke pusat**

Sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia di Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) kegiatan konsultasi ke pusat dimaksudkan untuk mengikuti Pertemuan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan oleh Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida). Lokasi pertemuan akan diinformasikan lebih lanjut.

## **5. Penyusunan Pemberkas**

Penyusunan pemberkas dilakukan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang sedang ditangani, penyusunan pemberkas dilaksanakan bersama-sama dengan Penyidik Polri setempat

## **IV. EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **A. Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun 2014 dilaksanakan secara berjenjang, evaluasi pelaksanaan KPPP Provinsi dilaksanakan oleh Pusat, evaluasi pelaksanaan KPPP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Provinsi. Pelaksanaan evaluasi diarahkan perkembangan realisasi kegiatan (fisik maupun keuangan).

### **B. Pelaporan**

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan terdiri dari :

#### **1. Laporan Bulanan**

Laporan bulanan merupakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung. Laporan ini disampaikan dari Kabupaten ke Propinsi, dengan tembusan ke Pusat (Ditjen PSP), sedangkan laporan bulanan Provinsi disampaikan ke Pusat (Ditjen PSP) dan Direktorat Pupuk dan Pestisida sesuai format lampiran 6.

## **2. Laporan Tahunan/Akhir**

### **1) Laporan Tahunan/Akhir oleh Kabupaten/Kota**

Laporan ini dibuat oleh Kabupaten/Kota disampaikan ke Povinsi dan ditembuskan ke Pusat. Laporan tahunan dibuat mengikuti outl line sebagaimana lampiran 7.

### **2) Laporan Tahunan/Akhir oleh Provinsi**

Laporan ini dibuat oleh Propinsi disampaikan ke Pusat, laporan yang disampaikan terdiri dari 2 bagian yakni laporan pelaksanaan kegiatan penguatan KPPP Provinsi dan laporan kegiatan KPPP Kabupaten/Kota yang merupakan rekap Kabupaten/Kota. Laporan disusun sesuai dengan out line sebagaimana lampiran 7. Dan disampaikan ke Direktorat Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alamat Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gd D Lt 9, Jl Harsono RM, No. 3 Ragunan – Jakarta Selatan.

## **3. Evaluasi Mutu Pupuk dan Pestisida**

Hasil analisa mutu sampel pupuk dan pestisida yang telah dilakukan oleh lembaga uji mutu pupuk dan pestisida dapat dievaluasi dengan memperhatikan beberapa hal.



## 1) Evaluasi Mutu Pupuk

Kandungan unsur hara sampel pupuk yang sudah diketahui berdasarkan hasil uji mutu pupuk, dapat dievaluasi dengan membandingkan nilai unsur hara yang tercantum dilabel pupuk.

## 2) Evaluasi Mutu Pestisida

Evaluasi mutu pestisida berdasarkan hasil uji mutu yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan kandungan bahan aktif pada label dengan memperhatikan batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Batas toleransi kadar bahan aktif pestisida

Kadar bahan aktif yang dinyatakan (%)	Kadar bahan aktif yang dinyatakan dengan (g/l)	Batas Toleransi
>/ 50	>/ 500	$\pm 2,5$ unit (%) $\pm 25$ unit (g/l)
25 - < 50	250 - < 500	$\pm 5$ (%)
10 - < 25	100 - < 250	$\pm 6$ (%)
2,5 - < 10	25 - < 100	$\pm 10$ (%)
0 – 2,5	0 - < 25	$\pm 15$ %

Format Rekapitulasi hasil analisa sampel pupuk dan pestisida sebagaimana ***lampiran 8***.

**LOKASI KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA KOMISI PENGAWASAN  
PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2014**

No.	Prov/Kab/Kota	No	Kabupaten
1	Nangroe Aceh Darussalam		
		1	Aceh Tengah
		2	Kota Sabang
		3	Kota Banda Aceh
		4	Pidie
		5	Pidie Jaya
		6	Kota Langsa
		7	Bener Meriah
		8	Aceh Besar
		9	Aceh Tenggara
		10	Nagan Raya
		11	Aceh Jaya
		12	Bireun
		13	Aceh Tamiang
		14	Aceh Barat Daya
		15	Aceh Selatan
		16	Simeuleu
		17	Aceh Utara
		18	Kota Lhokseumawe
		19	Aceh Timur
		20	Gayo Luwes

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		21	Aceh Barat
		22	Aceh Singkil
		23	Kota Subulussalam
	<b>Jumlah Aceh</b>	<b>23</b>	
<b>2</b>	<b>SUMATERA UTARA</b>		
		1	Samosir
		2	Medan
		3	Binjai
		4	Tebing Tinggi
		5	Langkat
		6	Deli Serdang
		7	Labuhan Batu Utara
		8	Nias Selatan
		9	Simalungun
		10	Asahan
		11	Tapanuli Utara
		12	Tapanuli Tengah
		13	Tapanuli Selatan
		14	Karo
		15	Labuhan Batu
		16	Nias
		17	Dairi
		18	Tj Balai
		19	P. Siantar
		20	Toba Samosir

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		21	Serdang Bedagai
		22	Humbang Hasundutan
		23	Pak-pak Barat
		24	Batu Bara
		25	Padang Lawas
		26	Padang Lawas Utara
		27	Labuhan Batu Selatan
		28	Nias Barat
		29	Nias Utara
		30	Gunung Sitoli
		31	Padang Sidempuan
		32	Madina
	<b>Jumlah Sumatera Utara</b>	<b>32</b>	
<b>3</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>		
		1	Kota Padang
		2	Pasaman
		3	Pasaman Barat
		4	Lima Puluh Kota
		5	Agam
		6	Tanah Datar
		7	Padang Pariaman
		8	Solok
		9	Solok Selatan
		10	Sijunjung
		11	Dharmasraya

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		12	Pesisir Selatan
		13	Payakumbuh
		14	Bukit Tinggi
		15	Padang Panjang
		16	Kota Solok
		17	Sawahlunto
		18	Kota Pariaman
	<b>Jumlah Sumatera Barat</b>	<b>18</b>	
<b>4</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>		
		1	Prabumulih
		2	Kota Palembang
		3	Musi Banyuasin
		4	Banyuasin
		5	Ogan Ilir
		6	OKI
		7	Oku Timur
		8	OKU
		9	OKU Selatan
		10	Muara Enim
		11	Lahat
		12	Musi Rawas
		13	Kota Pagar Alam
		14	Kota Lubuk Linggau
		15	Empat Lawang
	<b>Jumlah Sumatera Selatan</b>	<b>15</b>	

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
<b>5</b>	<b>JAMBI</b>		
		1	Kerinci
		2	Merangin
		3	Sarolangun
		4	Bungo
		5	Tebo
		6	Batang Hari
		7	Muaro Jambi
		8	Tanjab Barat
		9	Tanjab Timur
		10	Kota Jambi
		11	Kota Sungai Penuh
	<b>Jumlah Jambi</b>	<b>11</b>	
<b>6</b>	<b>BENGKULU</b>		
		1	Muko-muko
		2	Kota Bengkulu
		3	Rejang Lebong
		4	Lebong
		5	Kepahiyang
		6	Bengkulu Utara
		7	Bengkulu Selatan
		8	Kaur
		9	Bengkulu Tengah
		10	Seluma
	<b>Jumlah Bengkulu</b>	<b>10</b>	

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
<b>7</b>	<b>RIAU</b>		
		1	Walikota Pekanbaru
		2	Bengkalis
		3	Indragiri Hilir
		4	Rokan Hulu
		5	Kuansing
		6	Rokan Hilir
		7	Kampar
		8	Siak
		9	Pelalawan
		10	Indragiri Hulu
		11	kota Dumai
		12	Meranti
	<b>Jumlah Riau</b>	<b>12</b>	
<b>8</b>	<b>BANGKA BELITUNG</b>		
		1	Bangka Tengah
		2	Bangka Selatan
		3	Bangka Barat
		4	Belitung Timur
		5	Bangka
		6	Kota Pangkal Pinang
		7	Belitung
	<b>Jumlah Bangka Belitung</b>	<b>7</b>	
<b>9</b>	<b>LAMPUNG</b>		
		1	Tanggamus

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		2	Lampung Selatan
		3	Lampung Tengah
		4	Way Kanan
		5	Lampung Utara
		6	Lampung Timur
		7	Lampung Barat
		8	Tulang Bawang
		9	Metro
		10	Bandar Lampung
		11	Pesawaran
		12	Pringsewu
		13	Mesuji
		14	Ting Bawang Barat
	<b>Jumlah Lampung</b>	<b>14</b>	
<b>10</b>	<b>JAWA BARAT</b>		
		1	Cirebon
		2	Kuningan
		3	Bekasi
		4	Karawang
		5	Purwakarta
		6	Bandung
		7	Sumedang
		8	Garut
		9	Tasikmalaya
		10	Ciamis



No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		11	Kota Cimahi
		12	Kota Tasikmalaya
		13	Bogor
		14	Kota Sukabumi
		15	Indramayu
		16	Kota Depok
		17	Kota Cirebon
		18	Bandung Barat
		19	Majalengka
		20	Kota Banjar
		21	Kota Bandung
		22	Sukabumi
		23	Cianjur
		24	Kota Bekasi
		25	Subang
		26	Kota Bogor
	<b>Jumlah Jawa Barat</b>	<b>26</b>	
<b>11</b>	<b>BANTEN</b>		
		1	Lebak
		2	Tangerang
		3	Kota Serang
		4	Cilegon
		5	Serang
		6	Kota Tangerang
		7	Pandeglang

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		8	Kota Tangsel
	<b>Jumlah Banten</b>	<b>8</b>	
<b>12</b>	<b>JAWA TENGAH</b>		
		1	Brebes
		2	Tegal
		3	Kota Tegal
		4	Pemalang
		5	Pekalongan
		6	Kota Pekalongan
		7	Batang
		8	Kendal
		9	Kota Semarang
		10	Demak
		11	Grobogan
		12	Semarang
		13	Kota Salatiga
		14	Pati
		15	Jepara
		16	Rembang
		17	Blora
		18	Temanggung
		19	Wonosobo
		20	Magelang
		21	Purworejo
		22	Kebumen

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		23	Banjarnegara
		24	Purbalingga
		25	Banyumas
		26	Gilacap
		27	Boyolali
		28	Klaten
		29	Sragen
		30	Sukoharjo
		31	Karanganyar
		32	Wonogiri
		33	Kota Magelang
		34	Kota Surakarta
		35	Kudus
	<b>Jumlah Jawa Tengah</b>	<b>35</b>	
<b>13</b>	<b>D. I YOGYAKARTA</b>		
		1	Gunung Kidul
		2	Sleman
		3	Kulon Progo
		4	Bantul
		5	Kota Yogyakarta
	<b>Jumlah Di. Yogyakarta</b>	<b>5</b>	
<b>14</b>	<b>JAWA TIMUR</b>		
		1	Pacitan
		2	Ponorogo
		3	Probolinggo

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		4	Magetan
		5	Sumenep
		6	Blitar
		7	Kota Blitar
		8	Malang
		9	Lamongan
		10	Kota Kediri
		11	Kota Malang
		12	Pamekasan
		13	Lumajang
		14	Jember
		15	Bojonegoro
		16	Tuban
		17	Gresik
		18	Kota Mojokerto
		19	Kediri
		20	Banyuwangi
		21	Tulungagung
		22	Ngawi
		23	Jombang
		24	Mojokerto
		25	Nganjuk
		26	Kota Pasuruan
		27	Kota Madiun
		28	Sidoarjo

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		29	Madiun
		30	Bondowoso
		31	Kota Batu
		32	Bangkalan
		33	Trenggalek
		34	Situbondo
		35	Pasuruan
		36	Sampang
		37	Kota Probolinggo
		38	Kota Surabaya
	<b>Jumlah Jawa Timur</b>	<b>38</b>	
<b>15</b>	<b>BALI</b>		
		1	Buleleng
		2	Tabanan
		3	Badung
		4	Denpasar
		5	Gianyar
		6	Klungkung
		7	Karangasem
		8	Bangli
		9	Jembrana
	<b>Jumlah Bali</b>	<b>9</b>	
<b>16</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>		
		1	Mataram
		2	Lombok Barat

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		3	Lombok Utara
		4	Lombok Tengah
		5	Lombok Timur
		6	Sumbawa Barat
		7	Dompu
		8	Kota Bima
		9	Sumbawa
		10	Bima
	<b>Jumlah Nusa Tenggara Barat</b>	<b>10</b>	
<b>17</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>		
		1	Kota Kupang
		2	Rote Ndao
		3	TTU
		4	Belu
		5	Flores Timur
		6	Ende
		7	Manggarai Barat
		8	Sumba Barat
		9	Sabu Raijua
		10	Sikka
		11	Nagakeo
		12	Sumba Timur
		13	Kupang
		14	TTS
		15	Lembata

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		16	Ngada
		17	Manggarai
		18	Manggarai Timur
		19	Sumba Tengah
		20	Sumba Barat Daya
		21	Alor
	<b>Jumlah Nusa Tenggara Timur</b>	<b>21</b>	
<b>18</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>		
		1	Selayar
		2	Kota Makasar
		3	Pangkep
		4	Barru
		5	Gowa
		6	Takalar
		7	Bulukumba
		8	Sinjai
		9	Bone
		10	Soppeng
		11	Wajo
		12	Sidrap
		13	Pinrang
		14	Kota Palopo
		15	Luwu Utara
		16	Enrekang
		17	Tana Toraja

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		18	Toraja Utara
		19	Luwu Timur
		20	Kota Pare-pare
		21	Bantaeng
		22	Jeneponto
		23	Maros
		24	Luwu
	<b>Jumlah Sulawesi Selatan</b>	<b>24</b>	
<b>19</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>		
		1	Buol
		2	Donggala
		3	Kota Palu
		4	Poso
		5	Banggai
		6	Tojo Una-una
		7	Toli-toli
		8	Parigi Moutong
		9	Morowali
		10	Banggai Kepulauan
		11	Sigi
	<b>Jumlah Sulawesi Tengah</b>	<b>11</b>	
<b>20</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>		
		1	Mamuju Utara
		2	Mamasa
		3	Polewali Mandar



No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		4	Majene
		5	Mamuju
	<b>Jumlah Sulawesi Barat</b>	<b>5</b>	
<b>21</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>		
		1	Minahasa
		2	Minahasa Selatan
		3	Bolmong
		4	Bolmong Utara
		5	Talaud
		6	Bitung
		7	Tomohon
		8	Kota Mobagu
		9	Minahasa Utara
		10	Minahasa Tenggara
		11	Bolmong Timur
		12	Bolmong Selatan
		13	Sangihe
		14	Sitaro
		15	Manado
	<b>Jumlah Sulawesi Utara</b>	<b>15</b>	
<b>22</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>		
		1	Buton
		2	Konawe Selatan
		3	Kota Kendari
		4	Kolaka

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		5	Kolaka Utara
		6	Konawe
		7	Buton Utara
		8	Bombana
		9	Bau-Bau
		10	Muna
		11	Wakatobi
		12	Konawe Utara
	<b>Jumlah Sulawesi Tenggara</b>	<b>12</b>	
<b>23</b>	<b>GORONTALO</b>		
		1	Kota Gorontalo
		2	Pohuwato
		3	Boalemo
		4	Gorontalo Utara
		5	Bone Bolango
		6	Gorontalo
	<b>Jumlah Gorontalo</b>	<b>6</b>	
<b>24</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>		
		1	Kota Pontianak
		2	Sekadau
		3	Kota Singkawang
		4	Kayong Utara
		5	Kubu Raya
		6	Sambas
		7	Bengkayang

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		8	Ketapang
		9	Kapuas Hulu
		10	Pontianak
		11	Sanggau
		12	Landak
		13	Sintang
		14	Melawi
	<b>Jumlah Kalimantan Barat</b>	<b>14</b>	
<b>25</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>		
		1	Kotawaringin Timur
		2	Kapuas
		3	Kotawaringin Barat
		4	Barito Selatan
		5	Sukamara
		6	Murung Raya
		7	Katingan
		8	Seruyan
		9	Kota Palangkaraya
		10	Lamandau
		11	Pulang Pisau
		12	Gunung Mas
		13	Barito Timur
		14	Barito Utara
	<b>Jumlah Kalimantan Tengah</b>	<b>14</b>	
<b>26</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>		

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		1	Barito Kuala
		2	Banjjar
		3	HSU
		4	HSS
		5	Tapin
		6	Tanah Laut
		7	Kota Baru
		8	Hulu Sungai Tengah
		9	Tabalong
		10	Kota Banjarbaru
		11	Kota Banjarmasin
		12	Balangan
		13	Tanah Bumbu
	<b>Jumlah Kalimantan Selatan</b>	<b>13</b>	
<b>27</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>		
		1	Paser
		2	Kota Tarakan
		3	Berau
		4	Kota Balikpapan
		5	Penajem Paser Utara
		6	Nunukan
		7	Kota Samarinda
		8	Malinau
		9	Bulungan
		10	Kutai Kertanegara

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		11	Kota Bontang
		12	Kutai Timur
		13	Kutai Barat
		14	Tanah Tidung
	<b>Jumlah Kalimantan Timur</b>	<b>14</b>	
<b>28</b>	<b>MALUKU</b>		
		1	Maluku Tengah
		2	Buru
		3	Seram Bagian Barat
		4	Buru Selatan
		5	Seram Bagian Timur
		6	Maluku Tenggara
		7	Kota Tual
		8	Mal. Tenggara Barat
		9	Maluku Barat Daya
		10	Kep. Aru
		11	Kota Ambon
	<b>Jumlah Maluku</b>	<b>11</b>	
<b>29</b>	<b>MALUKU UTARA</b>		
		1	Temate
		2	Kep. Tidore
		3	Halmahera Utara
		4	Halmahera Tengah
		5	Halmahera Timur
		6	Halmahera Selatan

No	Prop/Kab/Kota	No	Kabupaten
		7	Halmahera Barat
		8	Kep . Sula
	<b>Jumlah Maluku Utara</b>	<b>8</b>	
<b>30</b>	<b>PAPUA</b>		
	<b>Total Kabupaten</b>		<b>441</b>

## Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
1	Balai Penelitian Tanah (Puslitanak Bogor)	Jl. Juanda 98 Bogor Telp. 0251-323012 Bogor 16123	Makro : N-Urea/Organik, N-NH <sub>4</sub> , N-NO <sub>3</sub> (total N), P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, MgO, CaO, S, dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat : Pb, Cd, Cr, Co dan Ni
2	Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No. 3 <sup>a</sup> Bogor 16111 Tlp. 0251-337975, 228820 Fax. 0251- 338820	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb, Cd Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Hg, biuret
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Karya Yasa No. 1B Gedung Johor Medan 20143 Tlp. 061.7870710.	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, CaO, MgO, Na, SiO <sub>2</sub> Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb, Cd
4	Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) jatim	Jl. Raya Krangploso Km. 4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jawa Timur Tlp. 0341 - 494052, 485056	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Mg, Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : -
5	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram 83010 Tlp. 0370-671312 Fak. 0370-671620	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg, Na Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
6.	Balai Penelitian Getas	Jl. Pattimura Km 6 Salatiga Tlp. 0298-322504 Fax 0298-323075	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg Mikro : Mn. Logam Berat : -

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
7	Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang	Jl. Tangkuban Perahu 517 Bandung Tlp.022-2786245- Fax 022-2786416	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Na Mikro: Mn, Cu, Zn, Al, Fe,Co,Mb Logam Berat : Hg, Pb.
8	Balai Penelitian Ternak	Jl. Raya Tapos Ciawi, Bogor Tlp. 0251-240751, 240752 Fax. 0251-240754	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro: Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
9	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel	Jl.Perintis Kemerde-kaan Km.17,5 Makassar Kotak Pos 1234 Tlp. 0411-55422,302317 Fax 0411-554522	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro: Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb,As, Hg, Cd.
10	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao	Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331-757130. Fax. 0331-757131 Jember	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Cd Tidak bisa : Mo, Co, As, Hg, Pb
11	Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan	Jl. Taman Kencana 1 Bogor Tlp. 0251-327449,324048 Fax 0251-629358	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro: Mn, Cu, Zn, B, Logam Berat : Cd
12	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan Tlp. 061-7862477 Fax. 061-7862488	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd Tidak bisa : biuret
13	Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Yogyakarta	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo 100 Tlp. 0274-586201 Fax. 0274-513849	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Al, Fe,Na,Cu,Sl. Logam Berat : Pb,As, Hg.
14	Jurusan Tanah, Faperta, Universitas Mataram	Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Tlp.0370644588 Fax 0370-644793	Makro: N,P <sub>2</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
15	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranti Kampus IPB Demaga Tlp. 0251629346,629357 Fax 0251-629358	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O, Mikro : Zn, B, Cu Mn, Mo,Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
16	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316.	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
17	Jurusan Tanah, Faperta UGM	Jl. Sekrip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp/Fax 0274-563062.	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
18	Faperta Universitas Nusa Cendana	Jl.Timtim Km 32 PO BOX 1022 Naibonat-Kupang Tlp.0380-825055 Fax 0380-833768	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu,Zn,Co Logam Berat : -



No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
19	PT Sucofindo Surabaya	Jl.Jend A. Yani 315 Surabaya Tlp. 031.8470547 Fak.031.8470663	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O, S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
20	PT.Sucofindo Bandar Lampung	Jl. Gatot Subroto No. 161 Lampung Tlp.0721-474660 Fax.0721-474661	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
21	PT Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Jakarta 13930 Tlp.021-4616555 Fax 021-4616618	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,Ca,Mg Mikro : B, Al,Fe,Zn,Cl Logam Berat : Pb, Cu
22	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 021-0725-46800	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, B, Cu, Zn Logam Berat :
23	PT. Rajawali Nusan tara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret
24	PT. Sucofindo Medan	Tlp. 061-8451880 Fax. 0618452568	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O, S,Mg dan Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb Tidak bisa : N-organik, Mo, Co, B, As dan Mg
25	PT. Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32986 Fax. 0761-32593	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg, Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, Al Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg
26	PT Sucofindo Cibitung	Jl.Arteri Tol Cibitung-Bekas Fax 8832166,88321162 Tlp.88321176	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O Mikro : Mn, Cu,Zn,B,Mo,Co Logam Berat : As,Hg,Cd,Pb
27	Peternakan Wirakarya Sakti	Jl. Ir.H. Djuanda No. 14 Jambi Tlp. 0741-551710	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,Ca,Mg Mikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb
28	PT. Mutu Agung Lestari	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No.19 Cimanggis Depok Tlp. 021-8740202	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,Ca,Mg Mikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb,Cr,Ni

**Lembaga Uji Pupuk Organik, Pembenh Tanah serta Hayati**

**A. Lembaga yang ditunjuk melakukan pengujian mutu pupuk organik dan pembenh tanah**

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Balai Penelitian Tanah Bogor	Jl. Juanda 98 Bogor 16123 Tlp. 0251-8323012	Makro : C organik, N-Organik, N-NH <sub>4</sub> , N-NO <sub>3</sub> (total N), P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, MgO, CaO, Na, S, dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat : Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Mo, As dan Hg Lain : pH, Biuret, setara CaCO <sub>3</sub> , Asam Bebas, Kehalusan/ukuran butir	Terakreditasi Ikut Uji Slang
2	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Jend.Besar Abd.Haris Nasution No.1 B Medan Sumut 20143 Tlp. 061-7870710	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,CaO,MgO,Na,SiO <sub>2</sub> Mikro : Fe, Mn, Cu Logam Berat : Pb,Cd	Terakreditasi Ikut Uji Slang
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel	Jl.Perintis Kemerdekaan km 17,5 Makassar Sulsel Tlp.0411-371572/556449/ 5059430	NPK, KCl, Urea, Amonium Sulfat, SP 36	Terakreditasi
4	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta	Karangsari, Wedomartani, Ngemplak Sleman, DIY Tlp. 0274-566823	-	Terakreditasi
5	Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) jatim	Jl. Raya Krangploso Km. 4 Kotak Pos 188 Malang 6510, jawa Timur Tlp. 0341-494052/ 485056	Makro: N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O, S,Mg, Ca Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn Logam Berat : -	Terakreditasi Ikut Uji Slang

6	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram NTB 83010 Tlp.0370-671312 Fak.0370-671620	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O, S,Ca,Mg,Na Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn Logam Berat : -	Terakreditasi Ikut Uji Silang
7	Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang	Jl. Tangkuban Perahu No. 517, Lembang Bandung-Jawa Barat 40391 Tlp.022-2786245- Fax. 022-2786245	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg,Na Mikro : Mn, Cu, Zn, Al, Fe,B Logam Berat : Ag, Pb.	Terakreditasi Ikut Uji Silang
8	PT. Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32986 Fax. 0761-32593	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg, Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg	Terakreditasi Ikut Uji Silang
9	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251-629346/629357 Fax. 0251-629358	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O, CaO, MgO Mikro : Fe, Zn, Cu, Mn, B Logam Berat : -	Ikut Uji Silang
10	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316	Makro : ,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Mo,Mn,B,Cu,Zn,Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.	Ikut Uji Silang
11	Jurusan Tanah, Faperta UGM	Jl. Sekrip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp/Fax. 0274-563062.	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.	Ikut Uji Silang pasif
12	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 021-0725-46800	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,S,Ca,Mg Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn Logam Berat :	Ikut Uji Silang
13	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret	Ikut Uji Silang
14	PT Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Jakarta 13930 Tlp.021-4616555 Fax 021-4616618	Makro : N,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ,K <sub>2</sub> O,Ca,Mg, Na,S Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn, B Logam Berat :	Ikut Uji Silang

**C. Lembaga Uji yang ditunjuk untuk melakukan pengujian mutu pupuk hayati**

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa
1	2	3	4
1	Balai Penelitian Tanah Bogor	Laboratorium Mikrobiologi Tanah, Jl. Juanda 98 Bogor 16123 Tlp. 0251-8323012	Rhizobium, azospirillum, azotobacter lactobacillus, mikoriza, bacillus, e. Colli salmonella, ragi, saccharomices, akaligen trichoderma, dll
2	Fakultas Pertanian IPB, Bogor	Laboratorium Bioteknologi Tanah, Dept. Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251-629346/629357 Fax. 0251-629358	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium, mikoriza
3.	Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada	Laboratorium Mikrobiologi Tanah Faperta UGM, Yogyakarta	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium
4.	Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya	Laboratorium Biologi Tanah, Faperta Unibraw, Malang	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium
5	Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran,	Laboratorium Mikrobiologi Tanah, Fakultas Pertanian Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316	Rhizobium, azotobacter, azospirillum, pelarut P
6	Fakultas MIPA Universitas Pajajaran, Sumedang	Laboratorium Biologi, Fakultas MIPA Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung	Lactobacillus, bacillus, e. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azobacter, azospirillum, rhizobium
7.	Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB)	Bogor	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium

### Lembaga Uji Mutu Pestisida

1. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Kementerian Pertanian
2. Laboratorium Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)
3. Laboratorium Balai Besar Industri Kimia, Kementerian Perindustrian
4. Laboratorium Pusat Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perindustrian
5. Laboratorium Balai Besar Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian
6. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Kementerian Pertanian
7. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian
8. Laboratorium Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Kementerian Pertanian
9. Laboratorium Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Laboratorium Fakultas Pertanian, IPB
11. Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, IPB
12. Laboratorium Fakultas MIPA, IPB
13. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, UGM
14. Laboratorium Fakultas Teknobiologi, UNIKA
15. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Maros, Sulawesi Selatan
16. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Padang, Sumatera Barat
17. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Surabaya, Jawa Timur
18. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Medan, Sumatera Utara
19. Laboratorium Kimia Agro UPTD-BPTPH, lembang, Jawa Barat

**REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI PEREDARAN PUPUK TAHUN 2014**

**PROVINSI .....**

No.	Kabupaten	Merek Pupuk	No. Pendaftaran pada label
1.		1. 2. 3. 4. 5. Dst	1. 2. 3. 4. 5. Dst
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst.			

REKAPITULASI					
HASIL INVENTARISASI PEREDARAN PESTISIDA TAHUN 2013					
PROVINSI		:			
NO.	KECATAMAN	DESA	MERK PESTISIDA	NOMOR PENDAFTARAN	KOMODITI PADA LABEL

**REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI PEREDARAN PUPUK TAHUN 2013**

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA .....

No.	Kecamatan	Merek Pupuk	No. Pendaftaran pada label
1.		1. 2. 3. 4. 5. Dst	1. 2. 3. 4. 5. Dst
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst.			







## OUTLINE LAPORAN AKHIR

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan dan Sasaran
  
- II. PELAKSANAAN
  - A. Tahap Pelaksanaan
  - B. Hasil Pelaksanaan
  
- III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
  
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### LAMPIRAN

- Tabel hasil inventarisasi
- Tabel hasil analisa sampel
- Dokumentasi kegiatan

**REKAPITULASI HASIL ANALISA SAMPEL PUPUK DAN PESTISIDA**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ..... \*)

**A. PUPUK**

No.	Kab./Kota/Kec. *)	Merek Pupuk	Kandungan Hara	
			Pada Label	Hasil Analisa
1.				
2.				
Dst.				

**B. PESTISIDA**

No.	Kab./Kota/Kec. *)	Nama Formulasi Pestisida	Kandungan Bahan Aktif	
			Pada Label	Hasil Analisa
1.				
2.				
Dst.				

Ket \*): Diisi sesuai dengan lokasi kegiatan